

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang dari masalah ini berawal sejak Penulis mulai memikirkan penyebab kemiskinan dan para pencari kerja yang tak kunjung berkurang, dari sudut pandang ini sudah sangat jelas bahwa perekonomian negara kita sedang berada dibawah, artinya bukan berada pada kelas menengah lagi. Sudah banyak rencana yang sudah disusun oleh pemerintah negara kita dalam mencapai pembangunan dalam berbagai aspek atau bisa kita sebut dengan pembangunan secara menyeluruh dan merata. Tentunya untuk mewujudkan pembangunan yang matang dalam berbagai aspek, dibutuhkan dana dan upaya yang amat sangat besar dalam segi materil. Seperti yang kita ketahui bersama, semua penerimaan negara yang berlangsung secara intens sejak tahun 90an tidak juga menambah kas negara dengan melejit, seperti tambang mas, tambang tembaga, tambang batu bara, migas, penerimaan pajak atau penyeteroran pajak dari berbagai wajib pajak dinegara kita dan lain sebagainya yang dianggap menduduki peringkat atas sebagai penyumbang harta atau kas bagi negara dikarenakan semua hasil bumi dan utang luar negeri juga akan membuat ekonomi negara menjadi semakin tidak stabil, dan jatuhlah harapan negara kepada penerimaan pajak yang dirasa cukup matang jika dipungut secara rutin dan semua wajib pajak sadar akan membayar pajak masing-masing untuk memajukan kesejahteraan negara. Pajak juga akan dijadikan seabgai penerimaan utama negara. Pemungutan pajak juga melalui beberapa tahap, mulai dari pemungutan secara berkala, penagihan, penyidikan atau pemeriksaan dsb. Kembali kepada pembangunan nasional, jika hanya

pemerintah yang memikirkan dan merencanakan, maka semua rencana pembangunan negara tidak akan berjalan sesuai rencana, oleh karenanya semua masyarakat dinegera NKRI juga harus memiliki wewenang dan hak serta kekuasaan dalam memberikan sumbangsih dalam memikirkan dan melakukan upaya untuk pembangunan bangsa dan negara. Pertanyaannya, bagaimana cara agar masyarakat juga ikut andil dalam pembangunan nasional ini? Penulis rasa sudah cukup semua uraian mengenai penerimaan negara melalui pemungutan pajak, penulis berharap agar semua Wajib Pajak bisa membayarkan Pajak dan melaporkan Pajaknya tepat waktu, terutama Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah sumbangsih dari para pekerja untuk negara dan bersifat mutlak. Banyak instansi pemerintah yang bertugas dalam mengoptimalkan pemungutan pajak, diantaranya DJP (Direktorat Jendral Pajak) sebagai pembuat aturan dalam hal pembayaran pajak, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai instansi pelayanan masyarakat yang melayani masyarakat langsung di daerah-daerah seperti melayani pembuatan NPWP, melaporkan SPT PPh Badan atau Pribadi, Informasi mengenai perpajakan, pemotongan atau pemungutan pajak, penagihan, pelayanan keberatan dan gugat. KPP memiliki beberapa jenis, seperti KPP Pratama, KPP Madya, KPP Besar, dan KPP Khusus. Namun yang akan saya bahas adalah KPP Pratama karena saya memang mengambil data dan mengetahui prosedur pemeriksaan melalui KPP Pratama tepatnya KPP Pratama Padang di Sumatera Barat.

Metoda pembayaran pajak ada 3, yaitu official assessment, self assessment, dan withholding system. Sebelum tahun 1983, pemerintah menerapkan peraturan pajak bahwa semua pajak dihitung oleh fiskus atau petugas pajak, namun karena dirasa memiliki kekurangan seperti Wajib Pajak yang lari dari tanggungjawab dan

menghindari fiskus serta ada beberapa kasus Wajib Pajak yang menyalahkan petugas pajak akan SPT PPh Tahunan yang sudah menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, maka pemerintah mengubah peraturan menjadi Wajib Pajak menghitung sendiri atau biasa disebut self assessment sejak tahun 1983 mulai dari menghitung, menimbang, membayarkan, dan melaporkannya sendiri besaran pajaknya, sedangkan fiskus atau petugas pajak hanyalah melayani apa yang diragukan oleh Wajib Pajak, mengawasi kecurangan yang mungkin terjadi pada Wajib Pajak, serta memberikan binaan kepada Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap proses pelaporan SPT Tahunan tersebut. Namun usaha pemerintah mengubah metoda tidak jauh berbeda dengan hasil official assessment, penerimaan pajak masih belum optimal dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang semakin lari dari tanggungjawabnya dan ada juga Wajib Pajak yang sering keliru dalam pelaporan dan penghitungan pajak yang dihitung sendiri seperti adanya perhitungan yang kurang bayar dan lebih bayar. Hal ini terjadi tentunya memiliki kesalahan dari berbagai sisi, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang merasa kurang pengetahuan mengenai pelaporan SPT dan kewajiban melaporkan SPT serta fiskus yang kurang memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak cara melaporkan SPT Tahunan agar penerimaan pajak menjadi sangat optimal sesuai target yang akan dicapai agar bisa merealisasikan semua perencanaan dalam pembangunan nasional. Hal itulah yang membuat Penulis tertarik untuk menggali tentang masalah kurang sadarnya Wajib Pajak dalam melaporkan SPT PPh dengan mengambil judul **“Evaluasi Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak**

Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan dan kinerja pemeriksa SPT PPh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang telah seperti yang diharapkan dan maksimal?
2. Apa saja masalah serta halangan sulit yang dialami oleh petugas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak?

1.3 Tuntutan Penulisan

Tuntutan yang ingin dicapai Penulis pada evaluasi pemeriksaan terhadap SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ini yaitu:

- a. Mencari tahu seberapa patuh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT mereka.
- b. Mencari tahu apa saja rintangan dan kelemahan terberat yang dialami oleh petugas pajak melakukan optimalisasi pemungutan pajak

1. Bagi peneliti

- a. Mengetahui seberapa keras usaha yang dilakukan pemeriksa pajak dalam optimalisasi pemungutan pajak
- b. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam hal pemeriksaan pajak.
- c.

2. Bagi perusahaan
 - a. Perusahaan diharapkan lebih bijak dalam mengambil sebuah kebijakan.
 - b. Para pegawai pajak diharapkan dapat melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan aturan UU perpajakan yang berlaku.
3. Bagi umum
 - a. Dapat menambah ilmu pembaca tentang pemeriksaan pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan dan berfaedah untuk penulisan selanjutnya.
 - b. Membuat pembaca lebih memahami betapa pentingnya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada pegawai pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Pada tugas akhir kali ini penulis tertuju pada proses pemeriksaan pajak yang bertujuan dalam memaksimalkan pemungutan pajak agar dapat membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dan yang menjadi fokus Penulis saat ini adalah SPT PPh Tahunan yang dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak Badan. Metologi penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir yaitu:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka ini dilakukan Penulis untuk langkah penelitian yang pertama agar mengetahui secara baik dan fakta bagaimana proses pemeriksaan pajak dan apa saja yang menjadi halangan bagi fiskus selama ini

2. Penelitian ditempat

Penelitian ditempat dilaksanakan dengan meminta dan merekap data langsung dari KPP Pratama Padang. Metoda yang penulis gunakan disini ialah dengan

cara mencari narasumber handal menurut pengamatan Penulis selama magang dan melihat sendiri dan mengamati langsung pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka sistematika penulisan laporan ini dibagi atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sumber dan pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

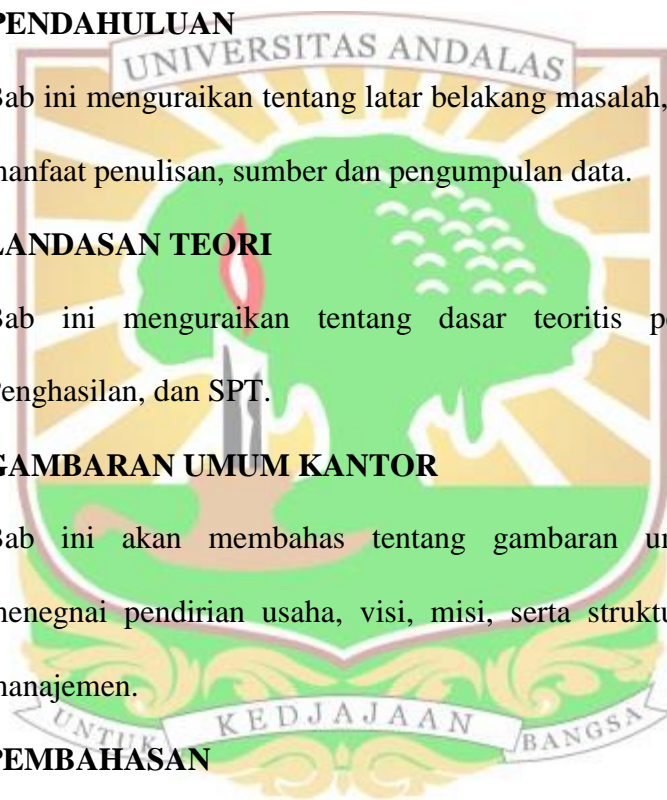
Bab ini menguraikan tentang dasar teoritis perpajakan, Pajak Penghasilan, dan SPT.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum perusahaan mengenai pendirian usaha, visi, misi, serta struktur organisasi dan manajemen.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan Penulis membahas evaluasi pemeriksaan pajak yang pada KPP Pratama Padang, dimulai dengan proses dan peraturan dan tindak lanjut dari petugas serta halangan terberat bagi petugas pajak.



BAB V PENUTUP

Pada bab akhir akan dituliskan kesimpulan akhir dari analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran

